

RINGKASAN

Penelitian ini mendiskusikan tentang Nilai Lingkungan dan Ekonomi pada Industri Batik di Kota Pekalongan. Perkembangan sentral usaha batik di Kota Pekalongan pada 4 tahun terakhir mengalami kenaikan dan penurunan dalam sisi jumlah unit usaha maupun jumlah tenaga kerja. Perekonomian masyarakat di Kota Pekalongan yang semakin meningkat mengakibatkan banyaknya limbah yang berasal dari industri batik baik PT maupun usaha kecil menengah. Masih banyak pengusaha (industri rumahan) yang membuang limbah hasil produksinya langsung ke selokan maupun ke sungai tanpa diolah terlebih dahulu. Pembuangan limbah tanpa pengolahan mengakibatkan pencemaran sungai. Dari permasalahan tersebut maka kewajiban pemerintah untuk mengatasi permasalahan lingkungan. Atas dasar Perda nomor 9 tahun 2015 tentang penggunaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menggambarkan implementasi Perda Nomor 09 Tahun 2015 tentang penggunaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) terkait nilai lingkungan dan ekonomi pada sentral batik di Kota Pekalongan.

Penelitian ini menggunakan model implementasi dari kebijakan Ripley dan Franklin dengan perspektif *What's Happening* (apa yang terjadi dilapangan) yang meliputi dua aspek yaitu Nilai Lingkungan dan Nilai Ekonomi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Teknik pemilihan informan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Pengumpulan data yang digunakan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis interaktif.

Hasil penelitian menunjukkan Dinas Lingkungan Hidup belum dapat mengarahkan pelaku usaha pro kepada lingkungan, hal ini dibuktikan dengan banyaknya pelaku usaha yang tidak tertib dalam mengelola air limbah. Pemerintah harus lebih tegas dalam menindak para pelaku usaha yang belum mematuhi Perda yang telah ditetapkan. Selain itu pemerintah diharapkan mampu membangun IPAL komunal dengan kapasitas yang lebih besar untuk mengurangi pencemaran lingkungan. Pelaksanaan Perda Pengelolaan Air Limbah belum membawa pelaku usaha pro ke nilai lingkungan karena dipengaruhi beberapa faktor diantaranya mata pencaharian masyarakat Kota Pekalongan yang banyak dari industri batik dan rendahnya komitmen membuat IPAL pribadi.

Kata kunci: ekonomi, implementasi kebijakan, limbah, lingkungan

SUMMARY

This study is discuss about the environmental and economic value Batik Industry in the Municipality of Pekalongan. The central development of batik business in Pekalongan Municipality in the last 4 years has increased and decreased in terms of the number of business units and the number of workers. So naturally the community's economy in the city of Pekalongan is increasing, resulting in a lot of waste originating from the batik industry both PT and small and medium businesses. The number of batik entrepreneurs in Pekalongan, there are still many entrepreneurs (home industry) that dispose of their production waste directly into the gutter or into the river without being processed first. Waste disposal without treatment results in river pollution. From these problems, the government's obligation to overcome environmental problems. On the basis of Perda number 9 of 2015 concerning the use of Waste Water Treatment Plants (WWTP) implemented by the Department of the Environment (DLH). The objective to be achieved in this research is to find out and describe the implementation of Regional Regulation No. 09 of 2015 concerning the use of Waste Water Treatment Plants (WWTP) related to environmental and economic values in the batik center in Pekalongan City.

This study uses an implementation model of Ripley and Franklin's policy with the perspective of What's Happening (what happens in the field) which includes two aspects namely Environmental Value and Economic Value. The method used in this research is descriptive qualitative method. The informant selection technique in this study is to use purposive sampling and snowball sampling techniques. Data collection used by interviews, observations and documentation. Data analysis method used is an interactive analysis method.

The results of the study show that the environmental service has not been able to direct pro business actors to the environment. The government must be more assertive in cracking down on business actors who have not conmplied with established regulations, beside the government is expected to be able to build communal WWTPs with greater capacity to reduce environmental pollution. The implementation of local regulation on waste water management has not brought pro business actors to environmental value because it is influenced by several factors including the livelihood of the people of municipality of Pekalongan, which are mostly from the batik industry and the low commitment to make private WWTPs.

Keywords: economy, environmental, policy implementation, waste